
Kolaborasi *Stakeholder* dalam Tata Kelola Telaga Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Hery Purnomo, Christine Sri Widiputranti, dan Hartono
Prodi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD “APMD”
Email: hery.purnomo.apmd@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kolaborasi *stakeholder* dalam tata kelola Telaga Desa Potorono. Telaga desa difungsikan sebagai sarana untuk menjaga fungsi ekologis air suatu wilayah. Kolaborasi antar *stakeholder* memberikan kebermanfaatan baik dari segi ekologis dan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar *stakeholder* telah terjadi, telaga Desa Potorono dapat meningkatkan kuantitas air tanah di sekitar telaga walaupun belum menunjukkan tata kelola yang baik. Alokasi anggaran pembangunan telaga desa mengalami kendala. Interaksi antar aktor juga belum berjalan dengan baik. Koordinasi masing-masing aktor tidak berjalan dengan baik. Telaga Desa Potorono telah memenuhi fungsi utama telaga sebagai media konservasi air. Implikasi dari aspek ekologis, keberadaan. Implikasi dari aspek ekonomi dengan adanya pembangunan Telaga Desa Potorono membawa berkah bagi masyarakat Desa Potorono terutama penduduk yang ada di sekitar telaga desa. Keberadaan telaga desa memunculkan aktivitas ekonomi.

Kata Kunci: *stakeholders, kolaborasi, tata kelola, aspek ekologis, aspek ekonomi*

Abstract

This study discusses the collaboration of stakeholders in the management of the Potorono Village Lake. The village lake functions as a means to maintain the ecological function of water in an area. Collaboration between stakeholders provides benefits both from an ecological and economic perspective. The method used in this research is descriptive research method with a qualitative approach. Research results: collaboration between stakeholders has occurred, although it has not shown good governance. The budget allocation for the development of the village lake had a problem. Interaction between actors and coordination has not been going well. Potorono Village Lake has fulfilled the main function of the lake as water conservation. The implication from the ecological aspect, the existence of the lake in Potorono Village can increase the quantity of groundwater around the lake. The implication from the economic aspect with the development of the Potorono Village Lake brings blessings to the people of Potorono Village, especially those around the village lake. The existence of the village lake gives rise to economic activity.

Keywords: *stakeholders, collaboration, governance, ecological aspects, economic aspects.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas tentang kolaborasi *stakeholder* dalam tata kelola Telaga Desa Potorono. Telaga desa difungsikan sebagai sarana untuk menjaga fungsi ekologis air suatu wilayah. Dalam pengelolaannya melibatkan berbagai macam *stakeholder* yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. *Stakeholder* tersebut kemudian memiliki kontribusi masing-masing dalam mengelola Telaga Desa. Kolaborasi antar *stakeholder* memberikan kebermanfaatan baik dari segi ekologis dan ekonomi.

Pemanfaatan potensi sumber daya air dengan optimal oleh masyarakat mendukung terjaminnya kesejahteraan masyarakat yang meliputi terpenuhi ketahanan pangan, ketersediaan air baku. Berbagai macam usulan dari bawah (*bottom up*) terkait sarana prasarana untuk dapat memanfaatkan sumber daya air bagi kesejahteraan masyarakat telah banyak disampaikan ke pemerintah dan kemudian pemerintah memberikan respons dalam bentuk kebijakan terkait pengelolaan sumber daya air.

Pengendalian daya rusak air dalam pengelolaan sumber daya air ditujukan

bagaimana dengan melakukan pengaturan-pengaturan yang secara sistematis dalam upaya meminimalisir daya rusak air terhadap lingkungan sekitar. Daya rusak air yang terjadi misalnya banjir di suatu wilayah aliran sungai maupun non aliran sungai. Bencana banjir yang terjadi apabila tidak ditangani akan memberikan permasalahan bagi kelangsungan kehidupan masyarakat pada umumnya.

Salah satu cara dalam mengatasi berbagai problem dan kondisi terkait dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air kemudian muncul teknologi tepat guna yang membantu masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dalam pemanfaatan sumber daya air. Keberadaan telaga desa dapat mengakomodasi terkait dengan menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.

Pembangunan Telaga Desa Potorono dilaksanakan pada tahun 2017. Pembangunan telaga desa tersebut berdasarkan inisiasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DIY bekerja sama dengan Pemerintah Desa Potorono. Lokasi pembangunan telaga desa memanfaatkan tanah kas desa.

Pembangunan telaga desa hingga telaga desa tersebut dapat dimanfaatkan berlangsung kurang lebih 1 tahun. Telaga desa yang difungsikan sebagai daya dukung ekologis bagi masyarakat Desa Potorono kemudian dikembangkan ke arah wisata.

Inisiatif tersebut dipelopori oleh kelompok masyarakat itu sendiri yang berada dalam naungan kelompok sadar wisata (pokdarwis) Cindamas. Sarana prasarana yang DLH persiapkan seperti *jogging track*, gazebo, parkir, kemudian dikelola sedemikian rupa oleh Pokdarwis Cindamas untuk menarik masyarakat desa maupun sekitar desa tersebut datang ke telaga desa. Telaga Desa Potorono menjadi ruang publik baru, di mana masyarakat umum dapat melakukan berbagai aktivitas, kemudian usaha ekonomi masyarakat muncul.

Multiplier effect dengan keberadaan Telaga Desa Potorono perlu disikapi dengan bijak oleh stakeholders. Pembangunan telaga desa yang awalnya difungsikan untuk meningkatkan fungsi ekologis kemudian muncul nilai tambah baru yaitu wisata. Pengelolaan yang baik sangat penting dilakukan. Dengan melihat kondisi tersebut, penelitian ini

memfokuskan pada bagaimana kolaborasi *stakeholder* dalam tata kelola Telaga Desa Potorono? Apakah tata kelola yang dilakukan berimplikasi pada aspek ekologis dan ekonomi?

Tata Kelola

Tata kelola telah digunakan untuk menggambarkan tindakan terpadu atau diarahkan dan perilaku, elemen struktur, pengaturan kelembagaan, instrumen hukum atau perundang-undangan dan proses partisipatif atau kolaborasi ideal. Gambaran tata kelola dipandang baik sebagai suatu proses, struktur, sistem nilai, atau produk tertentu atau hasil. Tata kelola menggambarkan hubungan antara orang-orang, cara-cara mereka berinteraksi satu sama lain dalam konteks lingkungan dan sistem dari prinsip-prinsip, aturan dan norma yang ditetapkan dalam interaksi.

Pada pengelolaan sumber daya air, terjadi perubahan fokus paradigma pengelolaan dari fokus pertama yaitu infrastruktur dan sentralisasi menjadi penekanan pada fokus kedua yaitu kelembagaan yang sifatnya desentralisasi. Penguatan aspek kelembagaan membutuhkan peran aktif *stakeholder* dalam pengambilan keputusan dan

menentukan kebijakan pengelolaan sumber daya.

Tata kelola menurut Williamson O dalam Turton (2007) dibagi menjadi tiga tipe, yaitu tata kelola perusahaan, tata kelola jaringan, dan tata kelola adaptif. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) pada umumnya mengacu pada sistem untuk promosi perusahaan, keadilan, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas kepada pemegang saham. Struktur tata kelola perusahaan menentukan hubungan dan pembagian hak dan tanggung jawab di dewan direksi, manajer, pekerja, dan pemegang saham. Tata kelola jaringan (*network governance*) mengacu pada cara untuk mencapai arah, kontrol, dan koordinasi individu dan organisasi yang memiliki berbagai tingkat otonomi untuk memajukan kepentingan atau tujuan bersama. Hal tersebut melibatkan konfigurasi organisasi pemerintah dan non pemerintah, undang-undang, organisasi, struktur keuangan dan program, peraturan administrasi dan rutinitas, tingkat sumber daya dan aturan, dilembagakan, dan norma-norma.

Tata kelola adaptif adalah proses menciptakan adaptasi dan *transforma-*

bility dalam sistem sosial ekologi. Adaptasi mengacu pada kapasitas untuk beradaptasi terhadap gangguan dan mereorganisasi saat menjalani perubahan sehingga dapat mempertahankan fungsi inti, struktur, identitas, dan masukan. *Transformability* mengacu pada kapasitas untuk menciptakan sebuah sistem baru secara fundamental (misalnya cara baru ketika ekologi, ekonomi, sosial, politik dalam kondisi yang tidak diharapkan), kondisi tersebut membuat sistem yang ada tidak bisa dipertahankan (Walker et al, 2004). Tata kelola adaptif berkaitan erat dengan manajemen adaptif (Walters, 1986), yang secara luas telah diajukan sebagai dasar yang diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan, tetapi sering gagal karena struktur tata kelola yang ada belum memungkinkan untuk berfungsi secara efektif (Walters, 1997).

Tata kelola menekankan pada pelaksanaan fungsi *governing* secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi lain, yaitu Instansi pemerintah terkait, LSM, perusahaan swasta maupun *civil society*. Tata kelola atau *governance* dimaknai sebagai proses memerintah (*governing*) yang dilakukan secara kolaboratif antara

lembaga pemerintah, semi pemerintah, dan non pemerintah.

Tata kelola sumber daya membutuhkan keterkaitan dan interaksi antar aktor yang masing-masing memegang peran penting. Pemerintah menetapkan aturan main dan regulasi, sementara ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung pengelolaan sumber daya dengan pengembangan teknologi yang sesuai dengan biofisik wilayah. Masyarakat dengan situasi sosial, ekonomi, dan lingkungan tertentu akan berinteraksi dengan pemerintah dan iptek sehingga membentuk tata kelola sumber daya yang kompleks. Tata kelola sumber daya yang baik memiliki beberapa norma dan nilai yang spesifik yang menjadi faktor kunci dalam proses pengelolaan yaitu efisiensi ekonomi, keadilan dan kesamaan, daya dukung dan ambang batas pemanfaatan sumber daya untuk menjamin keberlanjutan.

Penyusunan produk tata kelola sumber daya memerlukan struktur dan proses interaksi ketiga faktor kunci penyusunan tata kelola sumber daya (efisiensi, ekonomi, persamaan, dan keberlanjutan lingkungan). Dukungan kebijakan dan peraturan didukung oleh

instrumen pengelolaan berupa penilaian sumber daya, informasi tentang sumber daya, dan instrumen alokasinya. Pada kerangka kelembagaan diperlukan kerja sama dan interaksi antara pemerintah pusat dan daerah antar daerah-daerah dan antara pemerintah dan swasta. Interaksi faktor kunci dalam struktur dan proses tata kelola akan mewujudkan produk tata kelola sumber daya air yang seimbang sebagai sumber kehidupan dan sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis.

Aspek tata ruang/spasial merupakan salah satu hal yang penting dalam perencanaan pembangunan wilayah. Perkembangan suatu wilayah lebih dipengaruhi oleh wilayah di sebelahnya atau wilayah yang lebih dekat dibandingkan dengan wilayah lainnya yang lebih berjauhan akibat adanya interaksi sosial-ekonomi antar penduduknya.

Kolaborasi *Stakeholder* sebagai Kemitraan

Kolaborasi dalam penelitian ini difokuskan dalam artian kerja sama atau kemitraan. Kerja sama atau kemitraan merupakan bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk sebuah ikatan kerja sama dalam rangka

mencapai tujuan tertentu. Kemitraan dapat dilakukan oleh beberapa pihak atau kelompok dengan memiliki misi yang dapat berbeda ataupun sama. Model-model kemitraan dapat dibagi menjadi tiga yaitu, *pseudo partnership* (kemitraan semu), *mutualism partnership* (kemitraan mutualistik), dan *conjugation partnership* (kemitraan peleburan dan pengembangan) (Teguh Sulitayani, 2004).

Kemitraan semu merupakan kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih, tetapi tidak sesungguhnya melakukan kerja sama secara seimbang satu dengan yang lain. Tiap-tiap pihak dalam kemitraan ini belum tentu memahami tujuan dan manfaat dari adanya kerja sama yang dilakukan. Kemitraan mutualistik merupakan persekutuan antara dua belah pihak atau lebih di mana masing-masing pihak menyadari pentingnya melakukan kerja sama. Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “paramecium”, di mana melakukan peleburan untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah kembali.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam kajian ini terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melalui tinjauan langsung *in depth interview* dengan informan kunci, dokumentasi yaitu pengumpulan data dari informasi dengan cara menghimpun dokumen-dokumen tertulis, gambar-gambar sebagai sumber datanya, dan *focus grup discussion* (FGD) dilakukan dengan cara metode pengumpulan data dalam penelitian sosial dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Pembangunan Telaga Desa Potorono

Telaga desa Potorono berada di tanah kas Desa Potorono. Pada awalnya tanah kas desa yang berada di selatan Jembatan Plakaran merupakan lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Lahan tanah kosong malah berkali-kali dikeruk dan pemanfaatan kerukan tanah tersebut tidak jelas. Kondisi tanah desa yang pemanfaatannya tidak jelas

menimbulkan kerusakan pada aspek lingkungan sekitar tanah kas desa.

Tanah kas Desa Potorono yang menjadi telaga desa berada di Padukuhan Salakan. Dukuh Salakan, Pak Jumali, melihat kondisi yang terjadi di lahan tanah kas desa yang tidak termanfaatkan dengan baik, berinisiatif untuk mencoba mengelolanya. Dukuh tersebut membangun jejaring dengan berbagai pihak yang peduli terhadap lingkungan. Jejaring tersebut dimulai dengan pengelolaan sampah yang ada di Padukuhan Salakan. Sampah menjadi permasalahan yang menjadi perhatian dukuh tersebut. Dukuh membangun jejaring dengan pihak yang fokus pada pengelolaan sampah seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH), pegiat pengelola sampah, pegiat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Berbagai kegiatan tentang pengelolaan sampah diikuti oleh Dukuh Salakan. Jejaring dan komunikasi yang dilakukan Dukuh ini kemudian membawa arah pada pembicaraan pembangunan telaga desa di Desa Potorono.

Dukuh Salakan mendapat tawaran Program Telaga Desa yang digaungkan oleh BLH pada tahun 2017. Tawaran tersebut kemudian diinisiasikan Dukuh

Salakan dengan pihak pemerintah desa. Setelah adanya kesepakatan dengan Pemerintah Desa Potorono, tahap selanjutnya adalah menentukan lokasi pembangunan telaga desa. Lokasi tanah kas desa yang berada di Padukuhan Salakan yang menjadi pilihan. Rekomendasi yang diusulkan oleh Pemerintah Desa Potorono ditindaklanjuti oleh BLH dengan melakukan kajian.

Pendanaan pembangunan telaga berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2017. Dana anggaran pembangunan telaga dan komponen fasilitas penunjang menjadi kewenangannya dilimpahkan kepada kuasa pengguna anggaran di mana kuasa pengguna anggaran yang dimaksud adalah Badan Lingkungan Hidup. Inventarisasi pencatatan aset bangunan sementara tercatat pada kuasa pengguna anggaran. Pelaksanaan pembangunan telaga desa dilaksanakan oleh pihak ketiga. Program Telaga Desa memiliki dua tahapan pembangunan. Tahap pertama adalah pembangunan telaga desa, kemudian tahap kedua adalah pembangunan lanjutan fasilitas penunjang.

Pembangunan Telaga Desa Potorono dilaksanakan dimulai pada tahun 2017. Pembangunan telaga desa dapat dikatakan cepat karena pada akhir tahun 2017 sudah selesai untuk tahap pertama. Pembangunan Telaga Desa Potorono dapat dilaksanakan karena dari pihak desa telah berhasil memenuhi persyaratan administrasi pengajuan pembangunan telaga desa. Persyaratan administrasi yang krusial adalah bagaimana desa mampu untuk mengimplementasikan Peraturan Gubernur No 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa dengan membuat peraturan desa.

Proses pembangunan Telaga Desa Potorono mulai berjalan dan tahap 1 selesai mendapat pemantauan dari pemerintah daerah. Pemerintah Desa Potorono belum melakukan perizinan kepada kesultanan untuk memanfaatkan tanah desa. Alhasil, pengajuan anggaran pembangunan tahap kedua mengalami penundaan. Pada tahun 2020, ketika pandemi Covid-19 menerjang Indonesia, berimbas pada realokasi anggaran diarahkan atau fokus pada penanganan pandemi.

Pengelolaan Telaga Desa Potorono oleh Kelompok Sadar Wisata Cindamas (2017–2019)

Pengelolaan Telaga Desa Potorono diawali oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Cindamas. Pembangunan tahap pertama telaga desa yang sudah selesai mengharuskan pembentukan pengelola telaga desa. Pengelola telaga desa diharapkan mampu menjaga dan merawat kelangsungan telaga desa. Pokdarwis “Cindamas” merupakan kelompok sadar wisata dari Padukuhan Salakan. Setelah adanya serah terima antara BLH dengan Pemerintah Desa Potorono, dorongan pembentukan pengelola muncul dari berbagai pihak, salah satunya dari Dinas Pariwisata Bantul.

Dinas Pariwisata Bantul mendorong agar telaga desa dapat dimanfaatkan dan dirawat oleh kelompok sadar wisata. Dukuh Salakan kemudian mengadakan pertemuan terkait pembentukan kelompok. Perwakilan dari 7 RW dikumpulkan dan melaksanakan rapat. Pembahasan yang dilakukan menghasilkan susunan kepengurusan Pokdarwis dengan ketuanya Ali Qosim. Berikut susunan kepengurusan Pokdarwis “Cindamas”:

Setelah kepengurusan terbentuk, Pokdarwis “Cindamas” didaulat untuk mengelola Telaga Desa Potorono. Pengelolaan telaga desa melalui pokdarwis ini mendapat dukungan dari Dinas Pariwisata Bantul. Bentuk dukungan yang diberikan meliputi beberapa kali pelatihan terkait pengorganisasian kelompok, pelaksanaan Sapta Pesona, dan pengembangan kepariwisataan. Aktivitas kegiatan Pokdarwis meliputi perawatan lingkungan telaga desa, penataan telaga desa, pengorganisasian pedagang yang berjualan di area sekitar telaga desa.

Keberadaan Pokdarwis Cindamas di awal memiliki dampak yang positif bagi kelangsungan telaga desa. Berbagai kegiatan ataupun event berlangsung di area telaga desa, seperti kegiatan *merti* sungai, peringatan hari bumi, peringatan Hari Kartini yang dihadiri oleh GKR Hemas. Komunitas-komunitas pada akhir pekan silih berganti berkegiatan di area telaga desa. Telaga Desa Potorono menjadi ruang publik baru bagi masyarakat Desa Potorono dan sekitarnya. Kegiatan senam setiap minggunya membuat telaga desa hidup. Pengelolaan rekreasi diarahkan untuk memberi pakan ikan. Ada beberapa penjual pakan ikan yang

ditempatkan di beberapa titik pada area telaga desa. Kegiatan pemancingan tidak dilakukan di telaga desa, terselenggara hanya pada event tertentu.

Kunjungan masyarakat ke telaga desa ramai pada saat menjelang akhir pekan, yaitu hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Operasional aktivitas kegiatan dibatasi hingga pukul 18.00 WIB. Masyarakat yang datang ke telaga desa tidak dipungut biaya parkir, tetapi biaya parkir sukarela. Pada area telaga desa sebelah utara dibangun kedai atau warung makan yang menyajikan berbagai menu makanan dan minuman. Pengelola warung makan di-handle langsung oleh Ali Qosim (ketua pokdarwis Cindamas). Kemudian masyarakat sekitar membuka lapak-lapak makanan dan minuman ringan di sepanjang areal telaga desa (sisi barat). Pengelolaan yang dilakukan oleh Pokdarwis “Cindamas” membuahkan hasil yaitu adanya penambahan fasilitas gazebo 3 buah. Gazebo yang dibangun dananya berasal dari pengelolaan parkir. Kemudian ada CSR dari Bank Danamon yang masuk memberikan bantuan berupa bangunan toilet umum.

Pengelolaan yang dilakukan oleh Pokdarwis Cindamas dalam

perjalanannya mengalami berbagai dinamika. Dinamika yang terjadi di antaranya adalah muncul miss koordinasi antara pokdarwis dengan pemerintah desa. Beberapa pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh pokdarwis tidak melibatkan pemerintah desa. Pemerintah desa tidak mendapatkan informasi terkait perkembangan pengelolaan yang telah dijalankan pokdarwis. Di sisi lain pemerintah desa juga tidak memberikan dukungan secara konkret terhadap keberadaan pokdarwis. Pokdarwis tidak mendapatkan legitimasi dalam menjalankan pengelolaan telaga desa. Pemerintah desa belum mengeluarkan aturan dasar yang terwujud dalam peraturan desa tentang pengelolaan telaga desa. Selain itu juga, penugasan resmi kepada pokdarwis untuk mengelola telaga desa belum diterbitkan.

Aktivitas kegiatan pokdarwis yang tidak mendapatkan legitimasi dan *support* dari pemerintah desa, menyebabkan pengelolaan pokdarwis menjadi tidak berjalan dengan baik. Muncul berbagai prasangka dari dalam kepengurusan dan dari masyarakat yang ada di sekitar telaga desa. Pokdarwis Cindamas dalam aktivitasnya akhirnya

bergerak sendiri. Melihat kondisi yang kurang baik dengan munculnya sentimen ke pokdarwis, puncaknya di akhir tahun 2019 Pokdarwis Cindamas dibubarkan. Pokdarwis Cinda-mas ternyata memiliki hutang terkait dengan pembangunan kedai makan yang ternyata pembangunannya mendapatkan bantuan modal dari seorang pejabat publik. Modal tersebut harus dikembalikan.

Berbagai permasalahan yang muncul dalam pengelolaan yang dilakukan oleh Pokdarwis Cindamas, akhirnya pokdarwis dibubarkan. Pengelolaan telaga desa yang awalnya dilakukan pada tingkat dukuh kemudian beralih dikelola oleh desa melalui kepengurusan baru yang bernama Desa Wisata Sumber Mrue. Keberadaan anggota Pokdarwis Cindamas tetap ditawarkan untuk bergabung menjadi pengurus desa wisata. Kemudian pada awal tahun 2020 hingga awal bulan Maret 2020 penggodokan kepengurusan Desa Wisata Sumber Mrue dijalankan.

Pandemi Covid-19 yang melanda Yogyakarta akhirnya yang menyebabkan aktivitas Telaga Desa Potorono berhenti total. Telaga desa ditutup

portal untuk menghindari mengumpalnya warga di area telaga. Selama 6 bulan telaga desa ditutup, kondisinya tidak terawat. Banyak ikan yang diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pengelolaan Telaga Desa Potorono Oleh Pengelola Desa Wisata Sumber Mrue (2019–Saat Ini)

Pengelola Desa Wisata Sumber Mrue yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat pada akhir tahun 2019 merupakan pengelola yang levelnya berada pada tingkat desa. Pengelolaan aktivitas kepariwisataannya tidak hanya pengelolaan telaga desa, tetapi keseluruhan potensi sumber daya alam yang ada di Desa Potorono. Pengelolaan telaga desa merupakan sub unit atau bagian dari Pengelola Desa Wisata Sumber Mrue. Unit usaha wisata yang ada dalam Pengelola Desa Wisata Sumber Mrue meliputi Telaga Desa Potorono, pemancingan, wisata edukasi pertanian Kelompok Swadaya Masyarakat, Ruang Terbuka Hijau di Potorono, dan Kampung Keluarga Berencana. Dari unit wisata yang digerakkan dahulu tetap Telaga Desa Potorono.

Kepengurusan Desa Wisata Sumber Mrue mendapatkan dukungan dari pemerintah desa. Pemerintah desa mengawal pembentukan kepengurusan dan melakukan berbagai koordinasi. Pihak pemerintah desa bersama dengan perwakilan masyarakat mengadakan musyawarah untuk menentukan pengurus yang diangkat.

Kepengurusan unit wisata telaga desa mulai melakukan aktivitasnya dengan koordinasi. Langkah awal yang dilakukan adalah kerja bakti membersihkan areal telaga desa. Kemudian pembangunan kios-kios untuk pedagang di sisi sebelah selatan. Pemerintah Desa dalam pembuatan kios memberikan perhatian dengan memberikan bantuan modal, walaupun pembangunan menggunakan material lama/bekas.

Selain itu, pengurus harian telaga desa melakukan studi banding ke pantai yang ada di Gunung Kidul sekaligus kerja sama untuk meminjam peralatan kano. Peralatan kano ini yang akan dijadikan wisata baru di telaga desa. Pandemi Covid-19 menyebabkan telaga desa tidak berjalan, tetapi seiring dengan kondisi yang mengarah pada “*new normal*”, persiapan pembukaan

telaga desa dilakukan. Pembukaan telaga desa untuk umum diluncurkan pada akhir bulan Agustus 2020. Pembukaan telaga desa untuk umum ini sebagai upaya simulasi untuk melihat kesiapan pengelola dalam menjalankan aktivitas kegiatan wisata telaga desa.

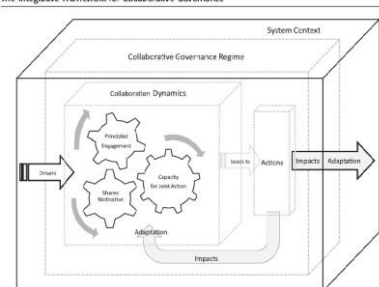
Telaga desa yang sudah dibuka menjadi hiburan yang dinanti-nanti oleh masyarakat Desa Potorono. Dengan dibukanya telaga desa masyarakat secara perlahan-lahan mendatangi objek wisata tersebut. Sore hari menjadi waktu favorit bagi masyarakat untuk menikmati suasana di telaga desa. Hal yang berbeda ketika sebelum pandemi adalah masyarakat yang datang menggunakan masker. Namun, dari pengamatan peneliti masih banyak ditemui masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, kesiapan dari pengelola harian masih terbatas.

Kolaborasi *Stakeholder* dalam Tata Kelola Telaga Desa Potorono

Tata kelola sumber daya air membutuhkan keterkaitan dan interaksi antar aktor yang masing-masing memegang peran penting. Pemerintah menetapkan aturan main dan regulasi, sementara ilmu pengetahuan dan

teknologi akan mendukung pengelolaan sumber daya dengan pengembangan teknologi yang sesuai dengan biofisik wilayah. Masyarakat dengan situasi sosial, ekonomi, dan lingkungan tertentu akan berinteraksi dengan pemerintah dan iptek sehingga membentuk tata kelola sumber daya yang kompleks. Tata kelola sumber daya yang baik memiliki beberapa norma dan nilai yang spesifik yang menjadi faktor kunci dalam proses pengelolaan yaitu efisiensi ekonomi, keadilan dan kesamaan, daya dukung dan ambang batas pemanfaatan sumber daya untuk menjamin keberlanjutan.

Figure 1
The Integrative Framework for Collaborative Governance

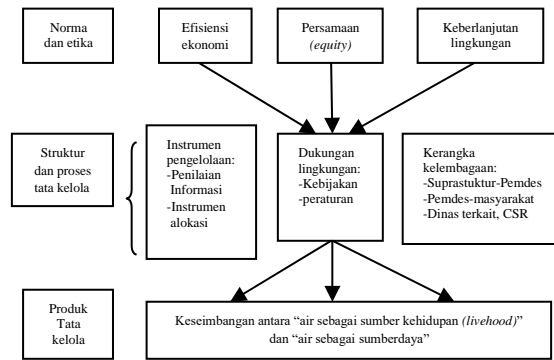


Sumber: Olahan data primer

Bagan di atas menunjukkan model ideal tata kelola sumber daya air. Penyusunan produk tata kelola sumber daya memerlukan struktur dan proses interaksi ketiga faktor kunci penyusunan tata kelola sumber daya (efisiensi, ekonomi, persamaan, dan keberlanjutan lingkungan). Dukungan

kebijakan dan peraturan di dukung oleh instrumen pengelolaan berupa penilaian sumber daya, informasi tentang sumber daya, dan instrumen alokasinya. Pada kerangka kelembagaan diperlukan kerja sama dan interaksi antara pemerintah desa dengan supra struktur-masyarakat-dinas terkait bahkan CSR. Interaksi faktor kunci dalam struktur dan proses tata kelola akan mewujudkan produk tata kelola sumber daya air yang seimbang sebagai sumber kehidupan dan sumber daya air sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis.

Dalam *collaborative governance*, interaksi faktor kunci menjadi hal yang sangat penting dalam mekanisme tata kelola. Interaksi antar kunci ini meliputi beberapa aspek penting, yaitu prinsip keterikatan, motivasi bersama, dan kapasitas tindakan. Ketiga aspek ini harus didorong secara simultan sehingga menciptakan dampak yang baik dalam tata kelola sumber daya. Tentu kolaborasi tata kelola membutuhkan ruang adaptasi. Masing-masing *stakeholder* yang berkaitan beradaptasi satu sama lain sehingga pergerakan ketiga aspek ini dapat berjalan.



Sumber: *Emerson, Kirk et. al, 2011*

Pengelolaan Telaga Desa Potorono pihak yang terlibat yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Ketiga aktor ini tentunya memiliki fungsi masing-masing dalam mendukung keberfungsian telaga desa.

Dari hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti, kolaborasi antar *stakeholder* yang terjadi dalam Pengelolaan Telaga Desa Potorono belum menunjukkan tata kelola yang baik. Instrumen pengelolaannya memang sudah terbangun yaitu alokasi anggaran. Namun, alokasi anggaran pembangunan telaga desa mengalami kendala dengan adanya penundaan realisasi anggaran pada tahap lanjutan pembangunan telaga desa. Kendala administrasi menjadi hal yang menyebabkan pembangunan tahap lanjutan tidak berjalan. Adanya halangan ini menyebabkan pengelola harus berupaya untuk mencari alternatif pembiayaan.

Dukungan lingkungan yang berupa kebijakan belum sepenuhnya terwujud. Dukungan dari pemerintah desa kepada pengelola telaga desa menjadi hal yang krusial di mana dukungan tersebut menumbuhkan sebuah *trust* dan kepastian dalam pengelolaan telaga Desa. Pengalaman pengelolaan yang dilakukan oleh Pokdarwis Cindamas merupakan bentuk konkret pemerintah desa tidak memberikan dukungan terhadap keberadaannya. Dari hal tersebut berdampak pada jalannya pengelolaan telaga desa. Kemudian pemerintah desa belum mampu untuk menghasilkan peraturan desa yang berkaitan dengan pengelolaan telaga desa. Peraturan desa tentang pengelolaan telaga desa menjadi pijakan dasar bagi pengelola untuk mengelola telaga desa.

Dalam kerangka kelembagaan belum berjalan dengan baik interaksi antar aktor. Koordinasi masing-masing aktor tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari pengalaman Pokdarwis Cindamas yang dalam kegiatannya seolah-olah berjalan sendiri tanpa ada koordinasi dengan *stakeholder* lainnya. Masing-masing aktor belum menemukan kesepakatan

bersama terkait dengan keberadaan telaga desa.

Implikasi Tata Kelola Telaga Desa Dari Aspek Ekologis dan Ekonomi

Pengelolaan Telaga Desa Potorono yang telah berlangsung dari tahun 2017 akhir hingga sekarang memiliki dampak dari aspek ekologis dan ekonomi. Pembangunan telaga desa secara ekologis telah memberikan dampak positif. Telaga Desa Potorono telah memenuhi fungsi utama telaga sebagai media konservasi air. Keberadaan telaga Desa Potorono dapat meningkatkan kuantitas air tanah di sekitar telaga sehingga kedalaman muka air tanah sekitar telaga menjadi lebih dangkal. Namun, dari hal positif ini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Kolaborasi antar *stakeholder* yang seutuhnya belum terbangun dengan baik membawa ancaman bagi keberadaan telaga desa itu sendiri. Bahaya laten yang dihadapi adalah ancaman banjir pada musim penghujan. Letak telaga desa yang berdekatan dengan Sungai Mrue memungkinkan ketika musim penghujan debit air sungai naik dan masuk ke area telaga desa. Kemudian area telaga desa belum dilengkapi dengan gorong-gorong/saluran drainase

di sepanjang area telaga desa. Sarana dan prasarana yang belum ada ini juga merupakan dampak dari anggaran pembangunan tahap lanjutan yang belum cair atau tertunda.

Implikasi dari aspek ekonomi dengan adanya pembangunan Telaga Desa Potorono membawa berkah bagi masyarakat Desa Potorono terutama penduduk yang ada di sekitar telaga desa. Adanya pemasukan berasal dari penjualan pakan ikan yang keuntungannya mencapai 50 %. Keberadaan telaga desa memunculkan aktivitas ekonomi. Banyak pedagang yang muncul seperti pedagang makanan, minuman ringan, pedagang mainan. Telaga Desa Potorono menjadi wajah depan dan ikon bagi Desa Potorono. Sebelum adanya telaga Desa, keberadaan tanah kas desa yang kondisinya tidak dimanfaatkan belum menjadi perhatian masyarakat. Sekarang Telaga Desa Potorono menjadi salah satu ikon yang menarik perhatian bagi masyarakat desamaupun dari luar. Aktivitas ekonomi yang berkembang ini menjadi modal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa (PAD) Desa Potorono, tetapi banyak rintangan yang muncul apabila

pengelolaannya tidak dilakukan secara baik dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

SIMPULAN

Keberadaan Telaga Desa Potorono menjadi ruang publik baru yang mengubah wajah depan Desa Potorono. Telaga desa memerlukan sentuhan dari berbagai pihak dalam pengelolaan telaga desa. Pemerintah desa, elemen masyarakat, dan swasta harus saling bersinergi dalam pengelolaan telaga desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antar *stakeholder* telah terjadi, walaupun belum menunjukkan tata kelola yang baik. Alokasi anggaran pembangunan telaga desa mengalami kendala. Interaksi antar aktor juga belum berjalan dengan baik.

Koordinasi masing-masing aktor tidak berjalan dengan baik. Bukti nyata yang menjadi gambaran adalah bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh Pokdarwis kemudian beralih ke unit yang dibentuk oleh pemerintah desa. Telaga Desa Potorono telah memenuhi fungsi utama telaga sebagai media konservasi air. Implikasi dari aspek ekologis, keberadaan telaga Desa Potorono dapat meningkatkan kuantitas

air tanah di sekitar telaga. Implikasi dari aspek ekonomi dengan adanya pembangunan Telaga Desa Potorono membawa berkah bagi masyarakat Desa Potorono terutama penduduk yang ada di sekitar telaga desa. Keberadaan telaga desa memunculkan aktivitas ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- BLH DIY (PT. Tri Patra Konsultan). 2017. *Laporan Akhir Pembangunan Telaga Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: BLH DIY.
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Emerson, Kirk et. al, 2011 *An Integrative Framework for Collaborative Governance*. *Journal of Public Administration Research and Theory* vol. 22: 1-29.
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Peme-rintahan Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Teguh Sulistiyani, Ambar. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Turton. AR., Hatting H J., Maree GA., Roux D J., Claassen M, Strydom WF. 2007. *Governance as a Trialogue: Gover-nment-Society-Science in Transition*. Berlin: Springer-Verlag Heidel-berg.
- Walker B, Holling CS, Carpenter SR and Kinzig A. 2004. *Resilience, Adaptability and Transformability in Social-Ecological Systems*. *Ecology and Society* (9): 5. <http://www.ecologyand.society.org/vol9/iss2/art5>
- Walters CJ. 1997. *Challenges in Adaptive Management of Riparian and Coastal Ecosystems*. *Conservation Ecology* (1) 2:1. <http://www.consecol.org/vol1/iss2/art1>